

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan satu dari beberapa negara dengan sistem demokrasi di dunia yang menyelenggarakan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, pemilihan umum secara langsung dilaksanakan pada pemilihan presiden, kepala daerah maupun anggota legislatif. Menurut Soche, mengatakan demokrasi merupakan sebuah bentuk perintah dari rakyat, maksudnya adalah rakyat menduduki tahta tertinggi dalam pemerintahan, rakyat juga memiliki kekuasaan untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri paksaan dari wakil mereka.¹ Secara sederhana demokrasi bisa dimaknai sebagai suatu pemerintahan yang tercipta dari rakyat dan tercipta untuk rakyat.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Cahyono, D. d. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar. *Pendidikan, Ilmu sosial dan Politik*, 832-842.

Pemilihan umum tahun 2024 dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia pada tanggal 14 februari 2024, dengan 5 surat suara yaitu : Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu ini diikuti oleh partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden. Pemilu tahun 2024 diselenggarakan di 38 provinsi yang ada di Indonesia.

Salah satu daerah yang ikut menyelenggarakan pemilu 2024 adalah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dalam pemilihan legislatif terdapat 35 calon terpilih DPRD Kabupaten Tebo periode 2024-2029. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara 2024. Perolehan suara yang di dapatkan pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Tebo adalah suara sah yang diperoleh dari jumlah 51.521 keseluruhan partai politik.

Dalam pemilu 2024 di Kabupaten Tebo, Partai Golkar memperoleh 27.283 suara, Partai PDIP 14.476 suara, Partai PKB 12.567 suara, Partai Gerindra 7.210 suara, Partai PAN 8.512 suara, Partai Nasdem 8.439 suara, Partai PKS 7.252 suara, Partai Demokrat 9.695 suara, dan Partai P3 1.590

suara. Berikut daftar caleg yang terpilih di DPRD Kabupaten Tebo periode 2024-2029:²

Table 1.1 Daftar Caleg yang Terpilih di DPRD Kabupaten Tebo

NO	DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV
1.	Eni Mawarti 3.518 suara (Golkar).	Feri Ariyanto 2.736 suara (Golkar).	Khalis Mustiko 8.487 suara (Golkar).	Sabki 2.907 suara (Golkar).
2.	Darul Kutni 3.433 suara (PKB).	Tibrani 2.328 suara (PKB).	Dimas Cahya Kusuma 3.676 suara (PDIP).	Ahmad Paisol 2.425 suara (Demokrat).
3.	H Pahri 2.715 suara (PDIP).	Sulman Elfarsy 1.590 suara (PPP).	Ahmad Ankam 4.246 suara (Golkar).	Suyadi 3.499 suara (PAN).
4.	Karno 4.338 suara (Gerindra).	Ihsanuddin 2.657 suara (PDIP)	Imam Syafi'i 3.469 suara (PKB)	Mursalin 1.954 suara (Nasdem).
5.	Yuzep Herman 2.181 suara (PAN).	Syamsuri 1.653 suara (PAN)	Khairul 1.378 suara (Gerindra).	Aivandri AB 2.988 suara (PDIP).
6.	Husni Fahri 3.018 suara (Nasdem).	Fahrudin Alroji 1.928 suara (Demokrat).	Sunoto 2.440 suara (PDIP).	Sahendra 3.337 suara (PKB).
7.	Edi Hartono 2.199 suara (PKS).	Saipul Anwar 3.467 suara (Nasdem).	H Ngatiran 4.141 suara (Golkar)	Pajri 3.012 suara (PKS).
8.	Radi Hartono 2.706 suara (Golkar).	Liga Marisa 2.683 suara (Golkar).	Siswanto 2.041 suara (PKS).	Ateng Jaelani 1.494 suara (Gerindra).
9.	Pahlepi		Dewi Ulfa Uluwiyah	

² Abraham, J. (2024). *Daftar 35 Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Tebo Periode 2024-2029, Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024*. <https://pontianak.tribunnews.com/2024/03/12/daftar-35-caleg-terpilih-dprd-kabupaten-tebo-periode-2024-2029-hasil-rekapitulasi-suara-pemilu-2024>.

	2.144 suara (Demokrat).		3.198 suara (Demokrat).	
10.			Efridarti 1.179 suara (PAN).	

Sumber : (KPU Kabupaten Tebo,2024)

Data table diatas menjelaskan tentang jumlah perolehan suara sah di Kabupaten Tebo pada pemilu 2024. Pada pemilu 2014, Partai Golkar memperoleh 11 kursi, begitu juga dengan pemilu 2019 yang juga menjadi pemenang pemilu dengan perolehan 9 kursi. Pada pemilu legislatif tahun 2019, Partai Golkar di Kabupaten Tebo meraih kemenangan kursi sebanyak 9 kursi dengan jumlah suara : 26,93 % suara penetapan keputusan tersebut ditetapkan oleh KPU. Hasil pemilu legislatif 2019 ditetapkan dalam Keputusan Nomor 135/PL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Tahun 2019. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional itu terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 PPLN dengan jumlah suara sah 139.971.260.

Sementara itu, dalam menghadapi pemilu 2024, Partai Golkar Kabupaten Tebo mengalami permasalahan dengan keluarnya kader-kader potensial. Seperti Agus Rubianto yang merupakan mantan ketua DPRD Tebo periode 2014-2019, dan Mazlan yang juga mantan ketua DPRD Kabupaten Tebo pada periode 2019-2024 yang hijrah ke Provinsi sebagai salah satu caleg Golkar DPRD Provinsi Jambi Dapil Bungo Tebo. Namun begitu, partai golkar tetap menjadi pemenang di pemilu Tebo 2024.

Dari Hasil Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Tebo, Golkar kembali meraih suara terbanyak dengan 27.283 suara dan mengamankan 8 kursi di DPRD Tebo. Maka menarik untuk melihat bagaimana konsolidasi pelembagaan yang dilakukan oleh Partai Golkar untuk meghadapi pileg 2024 dengan masalah yang dialaminya yaitu keluarnya kader partai yang potensial.

Selanjutnya, penulis menggunakan 7 *literatur review* sebagai referensi untuk penelitian ini. Pertama, Meifilina, Menghasilkan temuan bahwa Partai Golkar Kabupaten Blitar dalam melakukan pendidikan politik melalui media sosial adalah terlebih dahulu menetapkan komponen-komponen komunikasi sebagaimana yang dijelaskan Harold D. Laswell, yaitu komunikator politik, pesan, khalayak politik, media dan efek yang diharapkan. Untuk merebut suara masyarakat sebagai upaya untuk memenangkan pemilu legislatif DPRD Kabupaten Blitar lembaga Partai Golkar menetapkan atau menentukan media sosial yang akan digunakan, yaitu Instagram dan Facebook. Dua media sosial tersebut dinilai dapat memberikan dampak yang besar karena dengan penggunaan media sosial Instagram dan facebook jangkauan informasi yang disampaikan lebih luas. Penggunaan media sosial tersebut juga lebih menghemat biaya atau dana anggaran dari partai politik dan para caleg.³

³ Meifilina, A. (2021). Media Sosial sebagai Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Melakukan Pendidikan Politik. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(2), 101–110. <https://doi.org/10.33366/jkn.v3i2.80>

Penelitian strategi kampanye Partai Golkar yang dilakukan oleh Diajeng Puspa Anggraeni, Moh Ilyas Rolis (2024) yaitu membahas tentang Strategi Kampanye Digital DPD Golkar Jawa Timur dalam Pemilu 2024, dengan fokus pada penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis strategi kampanye digital DPD Golkar Jawa Timur dalam Pemilu Legislatif 2024, khususnya penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana partai merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi konten untuk menarik dukungan pemilih. Selain itu, penelitian juga menyoroti tantangan dalam memerangi misinformasi dan pentingnya interaksi dengan audiens.⁴

Hal ini sejalan dengan temuan Wibisono tentang strategi komunikasi politik partai Golkar dalam mempertahankan suara sebagai partai tengah pada Pemilu 2019 di Provinsi Jambi adalah dengan strategi kampanye terbuka dan strategi penggunaan media. Kendala yang dihadapi Partai Golkar dalam mempertahankan suara partai pada pemilu 2019 di Provinsi Jambi, yaitu berupa kendala finansial dan kinerja tim solusi yang diupayakan Partai Golkar dalam menghadapi kendala mempertahankan suara partai pada pemilu 2019 di Provinsi Jambi adalah dengan melakukan koalisi partai dan meningkatkan partisipasi konstituen.

⁴ Anggraeni, Diajeng Puspa (2024) Strategi kampanye via sosial media DPD Golkar Jawa Timur pada pemilu 2024. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel. 46-57

Kemudian terdapat beberapa hasil temuan yang menghasilkan tentang rekrutmen atau kaderisasi partai Golkar. Penelitian menghasilkan sebuah temuan bahwa Partai Golkar Karanganyar, dalam pembahasan ini secara aklamasi memilih Ketua DPD II Golkar Karanganyar untuk menjadi calon bupati. Kekalahan pada periode 2008, tidak menyurutkan Partai Golkar untuk mengusung kembali Juliyatmono pada pilkada 2019. Pola rekrutmen partai menjadi sangat penting untuk menjaring kader-kader yang berkualitas. Pengalaman organisasi, kemampuan dalam pengetahuan berbangsa dan bernegara, dan kemampuan menerapkan ideologi partai merupakan hal yang penting untuk dimiliki kader karena nantinya akan berhubungan dengan publik. Pengaruh Juliyatmono di internal dan eksternal partai terbilang cukup besar. Pengalaman di DPRD selama 16 tahun dan menjadi pemimpin beberapa organisasi massa di Karanganyar menjadi nilai penting untuk partai mengajukan dirinya sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Karanganyar.⁵

Kemudian temuan yang sejalan dengan Dewi bahwa Rekrutmen politik dalam tubuh partai memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas calon anggota legislatif Partai Golkar. Dalam hal ini diketahui proses rekrutmen Partai Golkar memiliki sistem seleksi tersendiri yang

⁵ Razaqtiar, A. Z. (2019). Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono-Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013. *Jurnal Politik Muda*, 5(3). <https://journal.unair.ac.id/JPM/peran-partai-politik-dalam-pemilihan-kepala-daerah--studi-upaya-partai-golkar-dalam-memenangkan-pasangan-calon-juliyatmono---rohadi-di-pemilihan-article-10807-media-80-category-8.html>

bernama penugasan fungsionaris. Melalui mekanisme ini, akan menjadi proses awal bakal calon anggota legislatif akhirnya ditetapkan sebagai calon tetap. Para bakal calon diberikan penugasan untuk melaksanakan program di masyarakat. Kemudian kinerja mereka dinilai dan dievaluasi oleh Tim Sinkronisasi Penugasan Fungsionaris.⁶

Terakhir yaitu hasil berbeda dengan temuan Dimas Dwicahyo dkk, yang melihat dari sisi komunikasi politik bahwa Strategi komunikasi politik Partai Golkar dalam mempertahankan suara sebagai Partai Tengah pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jambi. Fokus utama dalam penelitian ini untuk menganalisis strategi komunikasi politik Partai Golkar dalam mempertahankan suara pada Pemilu 2019 di Provinsi Jambi, kendala yang dihadapi oleh Partai Golkar dalam usaha tersebut, dan solusi yang diterapkan oleh Partai Golkar untuk mengatasi kendala dalam mempertahankan suara partai.⁷

Hasil temuan ini sejalan dengan Basri yang menyatakan bahwa strategi komunikasi politik yang diterapkan partai Golkar dalam pemilu legislatif ialah komunikasi yang terstruktur dari pimpinan pusat hingga kader di pedesaan sehingga pesan politik dapat tersampaikan secara merata, di dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2019, Golkar memberikan

⁶ Dewi, N. L. R. D., Suacana, I. W. G., & Rukmawati, D. (2023). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(1), 17–29.

⁷ Wibisono, D. D., Puspa, R., & Widodo, S. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Mempertahankan Suara Partai Sebagai Partai Tengah. *EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 832–842. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.284>

informasi kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih ataupun belum mempunyai hak pilih, mendidik masyarakat, menam-pung aspirasi masyarakat, dan mensosialisasikan yang ditujukan untuk pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya maka dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi pemilu legislatif Aceh Tengah tahun 2019, ada inisiatif dan berbagai cara dari pengurus DPD Golkar agar untuk menyampaikan segala bentuk program kerja kepada masyarakat, sebagai alat komunikasi politik partai seperti memberikan informasi kepada media masa, dan kendala yang dihadapi adalah masyarakat yang tidak menerima pesan dan tidak mau berkomunikasi dengan kader partai Golkar dikarenakan tidak tertarik pada kegiatan politik, masyarakat yang lebih tertarik pada manipulasi politik dan masyarakat yang sudah memiliki kandidat dari kerabat dekat.⁸

Selanjutnya hasil temuan dari pelebagaan partai. Pemilu merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem politik demokrasi modern. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu bahkan dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokratis atau tidaknya suatu negara⁹. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilu tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain

⁸ Basri, H. (2021). Strategi Komunikasi Politik DPD Partai Golkar pada Pemilu Legislatif Aceh Tengah 2019. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 22–32.

⁹ Anawati, D. M., & Al-Hamdi, R. (2020). Soliditas Partai dan Stabilitas Perolehan Suara: Konsolidasi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 105–125.

yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.¹⁰

Penelitian pelebagaan partai politik yang dilakukan oleh Muhammad Lutfi yaitu menganalisis proses pelebagaan Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada Pemilu 2009 dan menemukan bahwa Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kealahannya pada Pemilu 2009 belum berhasil membangun pelebagaan partai yang kuat. Hasil penelitian pertama, Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam hal-hal tertentu terkait dalam pengambilan keputusan masih dipengaruhi oleh kuatnya unsur ketokohan dan elitisme, baik yang berasal dari internal Partai Golkar Kabupaten Sinjai sendiri maupun dari level-level di atasnya (DPD I dan DPP). Kedua, pengurus partai di daerah jarang sekali melakukan inovasi dan kreatifitas program yang dapat mendukung arah dan perjuangan sesuai dengan visi dan misi partai. Program-program yang dilaksanakan senantiasa dilakukan sekedar melaksanakan amanah partai, tanpa ada tindak lanjut nyata sebagai wujud keberlanjutan program. Ketiga, lemahnya pemahaman kader partai akan ideologi dan platform partai sebagai basis identitas partai. Keempat, Partai Golkar Kabupaten Sinjai secara kelembagaan sampai saat ini tidak memiliki basis yang kuat di masyarakat.¹¹

¹⁰ Budiardjo, C. (1992). The Legacy of the Suharto Dictatorship. *The East Timor Question: The Struggle for Independence from Indonesia*, 51–67.

¹¹ Lutfi, M. (2013). Kiprah partai golkar kabupaten sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 2(2), 43–52. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v2i2.214>

Sejalan dengan temuan Primadi, pertama, dalam hal pengambilan kebijakan rekrutmen calon Gubernur dan Wakil Gubernur di pemilihan tahun 2017 masih diwarnai dengan pelanggaran konstitusi partai dalam artian pengurus partai dalam rekrutmen tidak berdasarkan mekanisme aturan AD/ART partai. Pengurus Golkar di level daerah tidak dilibatkan dalam proses penjaringan, seleksi, dan penetapan calon Gubernur ditubuh partai Golkar. Kedua, adanya “politik dagang sapi” dalam proses rekrutmen mengisyaratkan kecendrungan uang masih sangat kuat dalam mendapatkan rekomendasi dari level pusat dan dukungan dari level pengurus partai di daerah. Selain itu, sikap otoriter Hidayat Arsani yang menyebabkan antipati kader partai yang menyebabkan pengurangan suara dan dukungan dari internal partai itu sendiri.¹²

Berdasarkan beberapa *literatur review* diatas , bahwasannya peneliti mengelompokkan penelitian terdahulu menjadi 4 dimana masing-masing membahas terkait tentang kampanye kemenangan partai, rekrutmen atau kaderisasi partai, komunikasi partai, dan pelebagaan partai. Lebih lanjut dilihat tabel dibawah ini :

¹² Primadi, A., Efendi, D., Amriyanto, H., & Sanahdi, R. R. (2017). Making Informal Politics Work. Case of Local-Direct Election in Bangka Selatan, Indonesia. *2nd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2017)*, 468–477.

1.2 Table Pengelompokan Literatur Riview

No.	Jenis Pengelompokan	Hasil Temuan
1.	Strategi kampanye partai Golkar dalam pemilu	Diajeng Puspa Anggraeni, Moh Ilyas Rolis (2024) Berdasarkan beberapa literatur review ini dapat disimpulkan bahwa strategi kampanye partai golkar dapat dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya dengan media masa, pendidikan dll. Surat kabar sebagai salah satu bagian dari media masa yang mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pandangan dari surat kabar tersebut.
2.	Rekrutemen atau kaderisasi partai golkar	Arief Zaafril Razaqtiar (2020), Nih Luh Dewi (2023), Primadi (2020). Berdasarkan dari beberapa literatur riview ini dapat di simpulkan bahwa proses rekrutmen atau kaderisasi di partai golkar menjadi pola rekrutmen partai yang sangat penting untuk menjaring kader-kader berkualitas dan kompeten.

3.	Komunikasi politik partai golkar dalam pemilu	Meifilina (2021), Wibisono (2023), Basri (2021). Berdasarkan dari beberapa literatur riview ini dapat di simpulkan bahwa komunikasi politik partai golkar adalah komunikasi yang terstruktur.
4	Pelembagaan partai politik	Anawati & Al-Hamdi (2020), Muhammad Lutfi (2018), Sidik Firmadi (2017). Berdasarkan dari beberapa literatur riview ini dapat di simpulkan bahwa pelembagaan partai merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem politikdemokrasi modern.

Sumber : diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan pengelompokan data pada tabel diatas, pembahasan pada penelitian terdahulu partai Golkar berfokus pada strategi kampanye partai, rekrutemen, kaderisasi partai, komunikasi politik, dan pelembagaan partai. Yang membedakan penelitian ini fokus memperkuat kajian mengenai upaya pelembagaan partai golkar di Kabupaten Tebo. Maka penelitian ini mengajukan judul **“Analisis Konsolidasi Pelembagaan Partai Politik Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 : Studi Kasus Partai Golongan Karya (golkar) Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi ”**

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan penjelasan latar belakang masalah menunjukkan bahwa Partai Golkar masih dapat mempertahankan stabilitas perolehan suara di pemilu 2024, terlepas dari masalah keluarnya kader potensial yang berkontribusi pada perolehan suara Partai Golkar dalam dua periode pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan Bagaimana konsolidasi pelebagaan partai Golkar pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Tebo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana konsolidasi pelebagaan partai golkar pada pemilihan legislatif tahun 2024 di kabupaten Tebo.

1.4 Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis mengharapkan nantinya penelitian ini berguna sebagai sumber referensi dan memberikan wawasan tambahan mengenai pelebagaan partai politik. Dan juga hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu politik dan partai politik.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang bersinggungan dengan partai politik dan bagi mahasiswa atau pembaca diharapkan dapat menjelaskan bagaimana gambaran pelebagaan partai politik serta menjadikan partai Golkar di Kabupaten Tebo sebagai penerapan teori pelebagan partai.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Partai Politik

1.5.1.1 Pengertian Partai Politik

Keberadaan Partai Politik dalam kehidupan ketatanegaraan pertama kali dijumpai di Eropa Barat, yakni sejak adanya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang patut diperhitungkan serta diikut sertakan dalam proses politik, Dengan adanya gagasan untuk melibatkan rakyat dalam proses politik (kehidupan dan aktifitas ketatanegaraan), maka secara spontan partai politik berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain.¹³ Partai politik merupakan salah satu instrumen yang penting dalam membangun demokrasi. Schattschneider mengatakan bahwa partai politik menciptakan demokrasi dan demokrasi modern tidak bisa dilepaskan dari partai. Partai politik berperan sebagai saluran bagi pejabat publik untuk dapat duduk dalam jabatan publik tertentu

¹³ Budiardjo, C. (1992). The Legacy of the Suharto Dictatorship. *The East Timor Question: The Struggle for Independence from Indonesia*, 51–67.

melalui mekanisme sosial berupa pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁴

Perkembangan partai politik merupakan bagian dari perkembangan “*political society*” untuk mengontrol kekuasaan negara dan aparatus politiknya. Selain itu, dalam kaitannya dengan roda pemerintahan, partai politik berperan sebagai penghubung antara kepentingan warga dan pemerintah, mendorong pemerintah menjadi responsif terhadap warga negara, serta memberikan pengaruh pada proses-proses politik di legislatif. Lebih jauh, partai politik berperan penting dalam mengartikulasikan kepentingan suatu kelompok, kohesivitas partai politik dalam lembaga legislatif juga mampu menciptakan pemerintahan yang efektif.¹⁵

Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa sebagai organisasi yang secara khusus dipakai sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah, keberadaan partai politik sejalan dengan munculnya pemikiran mengenai paham demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Sudah banyak definisi yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai pengertian partai politik tersebut. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan tujuan yang sama¹⁶.

Menurut Carl J. Friedrich Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan

¹⁴ Ibid, 35-45

¹⁵ Astawa, I. P. A. (2018). *Demokrasi Indonesia*. Bandung: Universitas Udayana. 65-67

¹⁶ Budiardjo, C. (1992). The Legacy of the Suharto Dictatorship. *The East Timor Question: The Struggle for Independence from Indonesia*, 51–65.

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Sedangkan Sigmund Neumann menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.¹⁷

1.5.1.2.1.1 Fungsi Partai Politik

Menurut Friedrich partai politik adalah *"a group of human beings, stably organized with the objective of securing of maintaining for it's leads the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits advantages"*.¹⁸

Sementara menurut Budiarjo, Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

¹⁷ Ibid, 66-67

¹⁸ Syafiie, I. K., & Azhari. (2006). *Sistem Politik Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. 43-45

Berikut ini penjelasan secara lebih lengkap fungsi partai politik dinegara-negara demokrasi.

1) Sebagai sarana komunikasi politik

Dimasyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara dipadang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan. Kemudian pendapat dan aspirasi dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Hal ini memerlukan agregasi dan artikulasi agar pendapat tersebut tidak sia-sia. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi politik. Partai politik merumuskan menjadi usulan kebijakan melalui parlemen dan disampaikan kepada pemerintah agar menjadi kebijakan umum.

2) Sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Disinilah letaknya partai dalam memainkan peran sebagai sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran dan sebagainya.

3) Sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional lebih luas. Selain itu, partai politik juga berkepentingan memperluas keanggotaan nya.

4) Sebagai sarana pengatur konflik

Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahanya. Selain itu partai politik juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam berkembang diberbagai kelompok masyarakat.¹⁹

1.5.1.3. Pelembagaan Partai Politik

Konsep pelembgaan partai pertama kali dikemukakan oleh Samuel P. Huntingtin mengatakan bahwa pelembagaan partai adalah proses yang membuat organisasi dan prosedur memperoleh nilai dan stabilitas. Ada empat kriteria untuk mengukur pelembagaan partai, yaitu adaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Samuel P. Huntington baik untuk kita perhatikan terlebih dahulu. Huntington mendasari pemahaman pelembagaan partai politik dengan terlebih dahulu memahami persoalan stabilitas politik dengan menekankan adanya suatu “tertib politik” (political order), yang mengacu pada kondisi stabilitas politik, sebagai tujuan dalam

¹⁹ Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.23-27

pembangunan politik. Tertib politik ini dapat dicapai tergantung pada pembangunan lembaga politik dan mobilisasi kekuatan sosial-baru di bidang politik. Maka, sebagai pembuka bagi keseluruhan gagasan “tertib politik” ini, Huntington memulainya dengan kajian pelembagaan politik (*political institutionalization*).²⁰

Kemudian, Levitsky seperti dikutip oleh Randall dan Svasand, menekankan pelembagaan sebagai infus nilai, yaitu ideologi atau nilai-nilai bersama yang merupakan faktor penting dalam pelembagaan partai. Infusi nilai dipakai sebagai penjelasan adanya hal lainnya yang muncul diluar persoalan teknik organisasi. Dengan demikian, suatu partai melembaga apabila partai itu telah memiliki pendukung loyal dari sosial tertentu. Pola kebijakan yang dipejuangkan dan dukungan yang diberikan kepada partai merupakan orientasi politik sesuai ideologi partai tersebut.²¹

Randall dan Svasand memahami pelembagaan sebagai proses pemantapan partai politik dalam aspek struktural dan kultural yang mana aspek tersebut terwujud dalam pola perilaku serta dalam sikap dan budaya. Berdasarkan hal ini Randall dan Svasand mengemukakan bahwa terdapat empat dimensi dalam melihat pelembagaan partai politik, yaitu *Systemness* (kesisteman organisasi), kedua *Value Infusion* (identitas nilai), ketiga *Decisional Autonomy* (otonomi kebijakan) dan terakhir *Reification* (reifikasi). Indikator dalam melihat pelembagaan partai politik ini diperoleh

²⁰ Huntington, S. P. (2006). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press. 66-75

²¹ Levitsky, S. (1998). Institutionalization and Peronism: The Concept, the Case, and the Case for Unpacking the Concept. *Party Politics*, 4(1), 77–92.

dari hasil persilangan dua aspek dalam proses pelebagaan, yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural, sebagai berikut:

1. Kesisteman (*Systemness*) Aspek kesisteman dalam melihat pelebagaan partai politik berhubungan dengan proses pelaksanaan fungsi yang seharusnya dijalankan partai yang dijalankan sesuai urutan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang telah disepakati dan ditetapkan partai politik sebelumnya, di mana dalam hal ini adalah AD dan ART.
2. Identitas Nilai (*Value infusion*) Penyerapan nilai atau identitas nilai partai politik didasarkan atas ideologi dan platform partai, basis sosial pendukungnya dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan partai.
3. Otonomi Kebijakan (*Decisional Autonomy*) Otonomi Kebijakan mengacu kepada hubungan partai politik dengan ekosistem yang berada di luar partai, baik itu sumber otoritas seperti penguasa dan pemerintah atau sumber dana seperti pengusaha dan lain-lain, ataupun hubungan partai dengan sumber dukungan massa seperti organisasi kemasyarakatan.
4. Reifikasi (*Reification*) Reifikasi berkaitan dengan pengetahuan publik tentang Partai Politik. Hal ini merujuk pada bagaimana sebuah partai mampu menanamkan ideologi, nilai-nilai, serta platform partai di masyarakat. Reifikasi berkaitan dengan bagaimana partai memberikan citra kepada publik sehingga

menciptakan kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungan kepada partai dalam jangka waktu yang Panjang.²²

Sedangkan menurut Basedau & Stroh ada empat dimensi pelebagaan partai, jika di uraikan adalah sebagai berikut : Pertama , *Roots in society* (mengakar dalam masyarakat), maksudnya adalah partai ini memiliki akar yang stabil dalam masyarakat. Kedua, *autonomy* (independen dalam mengambil keputusan), maksudnya adalah kebebasan partai politik dari pengaruh luar partai dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan partai. Ketiga, *level of organization* (alat organisasi yang selalu bekerja untuk kepentingan partai di setiap tingkat kepengurusan), maksudnya adalah kepengurusan ditingkat atas hingga kepengurusan di tingkat bawahnya bekerja untuk kepentingan partai guna membesarkan partai dan memberikan kemenangan dalam pemilu. Keempat, *coherence* (kekompakan para anggota partai), maksudnya adalah kekompakan anggota partai dalam parlemen, sehingga tidak terjadi pembelotan dari anggota partai dan tetap berpegang teguh pada kebijakan partai yang telah diambil. Dari pemaparan di atas terlihat bahwa masing-masing ahli melihat pelebagaan partai pada penekanan yang berbeda-beda. Namun demikian, mereka sepakat bahwa pelebagaan partai merupakan suatu yang penting terutama bagi negara-

²² Randall, V., & Svåsand, L. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *Party Politics*, 8, 5–29. <https://doi.org/10.1177/1354068802008001001>

negara demokrasi baru. Partai merupakan faktor penting bagi perkembangan dan kondisi konsolidasi demokrasi.²³

1.6. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah menjelaskan secara abstrak suatu konsep dengan cara singkat dan jelas. Maka daripada itu definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Definisi Konsepsional adalah usaha untuk menjelaskan dengan memberikan pembatasan pengertian mengenai konsep yang satu dengan yang lainnya agar, tidak terjadi kesalahpahaman. Digunakan konsep ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Konsep ini juga digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.²⁴

Dalam definisi Konsepsional penulis menggunakan:

1. Pelembagaan Partai Politik adalah proses penguatan partai politik, baik dalam hal tindakan maupun budaya dan sikap dengan tujuan mencapai kestabilan organisasi.
2. Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan cita-cita bersama untuk mencapai suatu tujuan yaitu kekuasaan.

²³ Basedau, M., & Stroh, A. (2008). *Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties*. GIGA Working Paper. 34-40

²⁴ Abdussamad, Z. (2006). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. OSF. Penerbit, CV. Syakir Media Press. 32-45

1.7. Defenisi Operasional

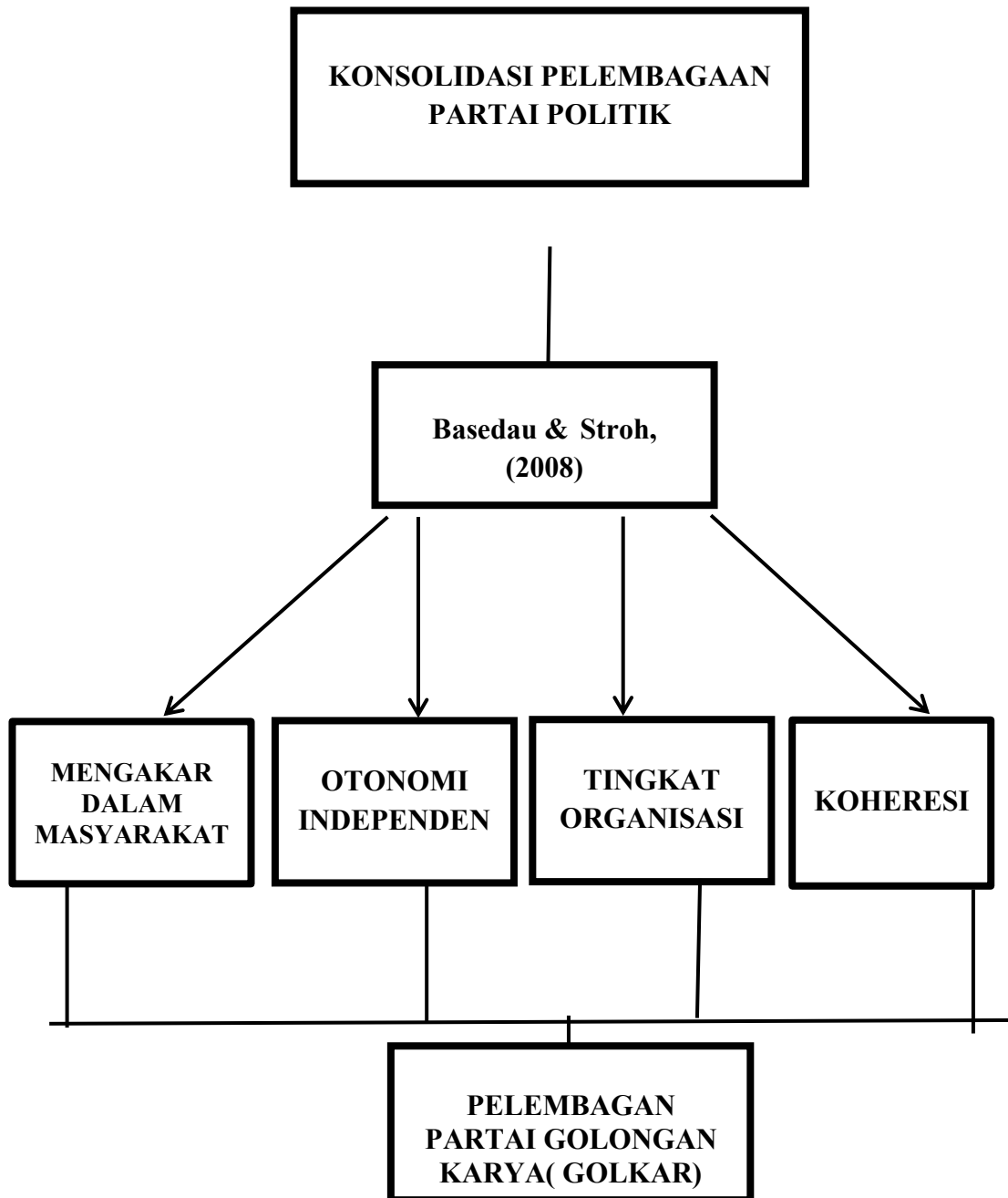
Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalisasikan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang mempunyai nilai. Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, definisi ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah judul-judul skripsi. Penafsiran yang berkaitan dengan istilah judul-judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Konsolidasi Pelembagaan Partai Politik pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Studi Kasus Partai Golongan Karya di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”, maka penelitian ini menggunakan teori dimensi pelembagaan partai menurut Basedau & Stroh, karena teori ini relevan untuk menjawab pada penelitian ini. Dengan indikator yaitu :

1. *Roots in society*(mengakar dalam masyarakat), maksudnya adalah apakah partai Golkar di Kabupaten Tebo ini memiliki hakikat di dalam Masyarakat. Artinya partai golkar ini mampu membentuk koalisi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk ormas, kelompok adat, atau organisasi keagamaan.
2. *Autonomy* (Otonomi independen dalam mengambil keputusan), maksudnya adalah apakah Partai Golkar menceminkan kemandirian partai dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, tanpa pengaruh dari sumber eksternal. Apakah Partai Golkar selalu berupaya mempertahankan citra positif dan hubungan dengan masyarakat di Kabupaten Tebo.

3. *Level of organization* (Tingkat Organisasi) (alat organisasi yang selalu bekerja untuk kepentingan partai di setiap tingkat kepengurusan), maksudnya adalah apakah kepengurusan ditingkat atas hingga kepengurusan di tingkat bawah partai golkar bekerja untuk kepentingan partai guna membesarkan partai dan memberikan kemenangan dalam pemilu.
4. *Coherence* (kekompakan para anggota partai), maksudnya adalah apakah kekompakan anggota partai dalam mengikuti pemilihan umum tahun 2024.²⁵

²⁵ Basedau, M. &. (2008). *Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties*. African: GIGA Working Paper No. 69.

1.8 Kerangka Berfikir



Sumber : diolah oleh peneliti (2024)

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis dan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²⁶ Maka daripada itu, penelitian ini memilih jenis kualitatif karena dianggap pantas digunakan untuk menjelaskan tujuan dari penelitian. Lebih daripada itu, jenis kualitatif memberikan fasilitas untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis dari masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell fokus dari studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks.²⁷ Studi kasus dalam penelitian ini adalah konsolidasi pelebagaan partai golongan karya pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Tebo.

²⁶ Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara. 37-40

²⁷ Creswell, J. W. (2014). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage Publications.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tebo dengan objek penelitian partai Golkar. Pelembagaan dalam partai merupakan hal sangat penting karena pelembagaan inilah yang membuat partai ini mampu atau tidak dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranannya. Dalam institusional partai, kompleksitas masalah yang muncul merupakan hal yang wajib diselesaikan. Pelembagaan pengetahuan atau citra publik seperti apa yang di bangun oleh partai Golkar dimata masyarakat Kabupaten Tebo.

1.9.3. Fokus Penelitian

Tujuan fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk membatasi penelitian sekaligus studi kualitatif untuk memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Maka dari itu, penelitian ini lebih berfokus pada konsolidasi pelembagaan partai golkar di Kabupaten Tebo.

1.9.4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data bisa diperoleh. Sumber data dibutuhkan untuk mendorong terlaksananya penelitian dan menjadi jaminan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu :

a. Data Primer

Data primer ialah sumber data yang didapat secara langsung saat di lapangan. Sumber data primer sangat diperlukan untuk mendukung temuan penelitian, karena data primer akan memberikan informasi yang akurat atau sesungguhnya dengan apa yang terjadi

sebenarnya. Wawancara merupakan sumber data awal yang digunakan dalam penelitian ini.²⁸ Yaitu data yang diperoleh dari keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang spesifik dengan Konsolidasi Pelembagaan Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Tebo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain. Sumber data sekunder bisa didapatkan melalui studi pustaka, dokumen, publikasi yang telah berbentuk jadi, serta buku maupun jurnal yang sesuai dengan topik yang akan diteliti. Data juga dapat diperoleh dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peneliti menggunakan sumber data seperti dokumen rencana strategis Partai Golongan Karya, Undang-Undang yang mengatur terkait seputar partai politik, rekrutmen kader-kader partai, serta bisa juga melalui media online, dokumentasi, berita acara, hasil rapat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat.²⁹

1.9.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu memakai teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* yang merupakan metode

²⁸ Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 18-24

²⁹ Ibid, 28-30

dalam menentukan sampel berdasarkan pertimbangan khusus, teknik ini juga merupakan bagian dari aspek teknik *non probability sampling*, dimana metode pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama kepada setiap komponen populasi atau individu.³⁰ Peneliti memilih orang/informan sebagai sampel dengan memilih informan atau narasumber yang terlibat langsung, atau informan yang dirasa memiliki kemampuan dan mengerti dengan permasalahan dan topik yang akan diteliti, yaitu tentang pelebagaan partai golkar pada pemilu legislatif tahun 2024. Selanjutnya, teknik *Snowball Sampling*, menurut Sutopo, adalah cara pemilihan informasi pada waktu dilokasi penelitian, yang kemudian berdasarkan petunjuk informan tersebut peneliti menemukan informasi baru dan seterusnya berganti informan lainnya yang tidak terencana sebelumnya, sehingga mendapatkan data yang lengkap dan mendalam.³¹

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan

³⁰ Creswell, J. W. (2014). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage Publications. 87-90

³¹ Sutopo, H. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Semarang: Universitas Sebelas Maret.

data didapatkan melalui teknik-teknik seperti observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Berikut adalah penjelasan terkait masing-masing metode tersebut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dengan berinteraksi langsung dengan individu yang menjadi responden. Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah jenis wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini masuk dalam kategori wawancara mendalam, di mana pendekatannya lebih fleksibel dari wawancara terstruktur. Adapun informasi dalam penelitian ini, data diperoleh melalui interaksi wawancara dengan narasumber, diantaranya ialah :

Tabel 1.3 Daftar Narasumber Wawancara

NO	JABATAN
1.	Ketua Dpc Partai Golkar (Khalis Mustiko. S.H)
2.	Sekretaris Dpc Partai Golkar (Mazlan, S.Kom, M.E)
3.	Ketua Badan Pemenang Pemilu Partai Golkar (Ahmad Kharis)
4.	Kader Yang Diusung Di Pemilu Legislatif Ditahun 2024 (H Ngatiran)
5.	Tokoh masyarakat (Sukarmin)
6.	Simpatisan dari masyarakat atau tim sukses (Suparmi)

Sumber : diolah oleh peneliti (2024)

b. Dokumentasi

Proses meninjau ulang sumber data dari dokumen yang tersedia disebut dokumentasi. Ini dapat dipakai untuk membuat data yang telah ditentukan lebih luas. Dokumen dapat berupa dokumen pribadi seseorang (buku harian, surat menyurat, e-mail, dan foto selama penelitian berlangsung), dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui pemeriksaan dokumen resmi seperti memo, catatan rapat, surat-menyurat, tupoksi dan renstra, dokumen kebijakan, proposal, arsip, data statistik, buku, berita online dari media lokal maupun nasional, artikel jurnal dan lainnya. Peneliti mendapatkan data dengan meninjau kembali literatur atau dokumentasi foto yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi akan di proses dalam beberapa tahapan sebelum digunakan. Menurut Al- Hamdi terdapat empat tahapan dalam analisa data yakni pengumpulan dan pengolahan data, seleksi data, analisis antar-variabel dan verifikasi data, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan dan pengolahan data

Data-data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dikelola sesuai dengan kebutuhan penelitian peneliti memilih data-data tersebut sesuai dengan indikator- indikator yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Seleksi data

Pada tahapan ini, data-data yang telah disusun sesuai kategori kemudian akan dipilih dan dipilah kembali untuk mendapatkan data yang memang berguna serta sesuai dalam proses analisis.

c. Analisis antar-variabel dan verifikasi data

Langkah selanjutnya setelah seleksi data adalah menghubungkan antara satu variabel atau indikator dengan variabel atau indikator lainnya.

d. Penafsiran dan penarikan kesimpulan

Semua temuan yang telah disajikan, selanjutnya akan ditafsirkan sebagai usaha untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan diatas. Hasil tafsiran tersebut kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dari rangkaian penelitian secara keseluruhan.³²

³² Al-Hamdi, R., Sakir, S., Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). *Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*. Pustaka Pelajar.28-32

1.9.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi merupakan sebuah metode yang memanfaatkan berbagai sumber untuk memverifikasi data yang telah dikumpulkan. Hal ini bisa mencakup konfirmasi hasil dengan sumber lain, analisis kasus, maupun observasi sistematis dalam berbagai situasi. Metode ini membuat data yang diperoleh lebih konsisten, terperinci, dan kuat, yang meningkatkan keandalan hasil penelitian. Validitas data dalam penelitian ini diukur melalui triangulasi sumber data. Triangulasi ini digunakan untuk memverifikasi validitas data atau informasi dengan menggunakan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi.³³

³³ Risnaedi, A. S. (2021). *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa*. Penerbit Adab.